



Isoter Disiapkan

JOGJA—Pemerintah Pusat menetapkan DIY masuk PPKM Level 3 seiring meningkatnya kasus Covid-19. Sejumlah tempat isolasi terpusat mulai disiapkan.

*Lugas Subarkah, Sunartono, & Sirojul Khafid
redaksi@harianjogja.com*

Meski demikian hingga Senin (7/2) siang, DIY belum mendapatkan salinan detail aturan PPKM Level 3. Namun

isolasi terpusat (isoter) dan *bed* rumah sakit disiapkan untuk mengantisipasi penambahan kasus.

► **Pemkab Sleman bersiap mengaktifkan kembali selter tingkat kalurahan.**

► **Pemda DIY belum membahas kemungkinan adanya penyekatan di wilayah perbatasan DIY.**

Sekda Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan saat ini Pemkab Sleman menyediakan dua isoter Covid-19, yakni Asrama Haji dan Rusunawa Gemawang. Keduanya mulai terisi pasien Covid-19 sejak lonjakan kasus positif pada Februari ini.

Selain dua selter ini, Pemkab Sleman bersiap mengaktifkan kembali selter di tingkat kalurahan, jika

memang terjadi lonjakan kasus yang signifikan dan kedua isoter penuh.

“Skemanya apabila selter Pemkab sudah penuh baru kita efektifkan yang kelurahan,” ujarnya, Senin (7/2).

Adapun kapasitas di kedua isoter tersebut untuk Asrama Haji sebanyak 136 *bed* dan Rusunawa Gemawang 101 *bed*. Per Senin (7/2) sore, keterisian Asrama Haji sebanyak 57 pasien atau 41% dan Rusunawa Gemawang 33 pasien atau 30%.

Setelah diputuskan masuk PPKM level 3, DIY masih menunggu salinan aturan tersebut dari Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat memutuskan pembatasan aktivitas masyarakat. Terutama melihat kemungkinan ada atau tidaknya perbedaan antara Level 3 PPKM saat Varian Delta dengan saat ini adanya Varian Omicron. “Dulu Delta sekarang Omicron, perlu kami

lihat [ketentuan] menteri, apa saja yang harus dilakukan. Kira-kira ketentuan Level 3 Omicron itu sama enggak dengan Level 3 saat Delta? Kalau sama berarti seperti sebelumnya, tetapi kalau beda ya nanti menyesuaikan,” kata Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, di Kepatihan Jogja, Senin.

Jika aturan Level 3 PPKM nantinya sama dengan saat Level 3 PPKM sebelumnya, lanjut Aji, tentu ada pembatasan untuk wisata. Namun ia lagi-lagi belum dapat memastikan karena masih menunggu resmi dari Pusat.

“Kalau memang ketentuan seperti level 3 yang dulu [untuk wisata] kan pembatasan, bukan penutupan. Saat itu ada pembatasan 50 persen dan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Isoter Disiapkan

Baskara Aji juga belum membahas terkait dengan kemungkinan adanya penyekatan di wilayah perbatasan DIY. Namun ia memastikan akan memperketat berbagai aktivitas masyarakat agar taat prokes dan mempersiapkan fasilitas kesehatan. "Peduli Lindungi harus diterapkan, isoter kami siapkan, tempat tidur RS juga, yang kemarin sudah dipakai umum, kami minta kembali dipakai untuk Covid-19. Kalau sebelumnya PPKM kami lakukan di level pedukuhan kefurahan RT," katanya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti tidak mau berspekulasi terkait dengan penerapan PPKM Level 3 di wilayahnya. "Tunggu instruksi resminya dulu. Kami akan terapkan sesuai keputusan Pemerintah Pusat. [Aturan di Pemkot Jogja] tidak akan berbeda dengan keputusan Pemerintah Pusat, akan mengikuti acuan sebagai wilayah dalam menerapkan PPKM level 3," kata Haryadi.

Kapasitas Tempat Ibadah

Kepala Kanwil (Kemenag) DIY, Masmin Afif, meminta kabupaten/kota menyesuaikan level PPKM untuk masing-masing terkait peribadatan.

"Kami sudah sampaikan seluruh jajaran di Kemenag [kabupaten/kota] DIY untuk menyosialisasikan ke seluruh masyarakat. Tadi pagi saat apel sudah kami sampaikan pebimas Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Islam untuk menyampaikan kepada tokoh menyikapi situasi agar

kita bisa ikut berkontribusi pengendalian Covid-19 yang sekarang mulai naik," katanya.

Khusus untuk DIY, Masmin menyatakan sampai Senin sore belum ada edaran resmi terkait dengan level terbaru PPKM. Namun, prinsipnya akan menjalankan saturan Pusat. Terutama kapasitas tempat ibadah yang maksimal 50%, menurutnya bisa diterapkan di tengah kasus Covid-19 yang terus melonjak.

Masmin meminta aktivitas sosial keagamaan masyarakat seperti Ruwahan juga harus diperhatikan dengan mematuhi prokes dan tidak menimbulkan kerumunan.

Penambahan Kasus

Pada Senin kasus harian Covid-19 di Bumi Mataram tercatat 149 kasus. Adapun untuk terduga Omicron atau pasien yang menjalani pemeriksaan S-gene Target Failure (SGTF) menjadi 268 kasus.

Kabag Humas Biro UHP Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan penambahan kasus harian tersebut berasal dari Sleman (63 kasus), Kota Jogja (47), Bantul (34), Kulonprogo (3), dan Gunungkidul (2).

Rincian riwayat kasus terkonfirmasi Covid-19 berasal dari periksa mandiri ada 94 kasus dan *tracing* kontak kasus positif 55 kasus.

Ia menambahkan kasus sembuh dilaporkan bertambah sebanyak 27 kasus, dan kasus pasien meninggal nihil. "Positivity rate harian per tanggal 7 Februari

2022 di angka 1,49 persen," katanya.

Wilayah Aglomerasi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sejumlah wilayah aglomerasi, termasuk DIY, naik ke level 3 PPKM.

"Berdasarkan level asesmen saat ini, kami sampaikan aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya, akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya *tracing*," kata Luhut, Senin.

Luhut menjelaskan sejumlah penyesuaian dalam aturan PPKM level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid dan belum divaksin.

Hal itu dilakukan lantaran karakteristik varian Omicron berbeda dengan varian Delta. Meski lebih cepat menular, varian Omicron memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah dibanding Delta. Namun, kriteria lansia, komorbid, dan belum divaksin, memiliki risiko tinggi apabila terpapar Omicron.

Sejumlah penyesuaian seperti kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan maksimal pengunjung 60%. Sementara itu, untuk pasar raya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung 60 persen. (*selengkapnya lihat grafis*) (Antara/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005